

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**ZULJALALI WALIKROM
NPM : 1221010017**

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Pembimbing I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**ZULJALALI WALIKROM
NPM : 1221010017**

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Pembimbing I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Salah satu ketentuan yang cukup penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum." Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut menadampingi prinsipal dalam pertemuan mediasi. Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dijadikan sebagai objek penelitian terkait dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai revisi dari Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengetahui implementasi prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dan fantor pendukung serta penghambatnya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Temuan penelitian lapangan menunjukkan Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perma tersebut, prosedur mediasi ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa apabila ada perselisihan atau

sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*Ishlah*”, karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS: Al-Hujurat (49): 9. Faktor pendukung mediasi berasal dari para pihak yang berperkara yakni hadir dalam pertemuan mediasi, para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam serta tidak bersikap emosional melainkan bersikap pemaaf, para pihak mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Adapun penghambatnya adalah: perkara yang disengketakan sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai rasional sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, ketidak hadirannya salah satu pihak.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa: ZULJALALI WALIKROM

NPM : 1221010017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhiyah

Judul skripsi : Prespektif Hukum Islam Tentang
Inflementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi (Studidi di Pengadilan Agama Kelas
1A Tanjung Karang)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2017

Pembimbing I,

Drs.H,Khoirul Abror,M.H.
NIP.195704031987031003

Pembimbing II,

Marwin,S.H.,M.H.
NIP. 197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin,S.H.,M.H.
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Prespektif Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**, disusun oleh Nama: **Zuljalali Walikrom Npm: 1221010017, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal: 21 Februari 2017 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah.**

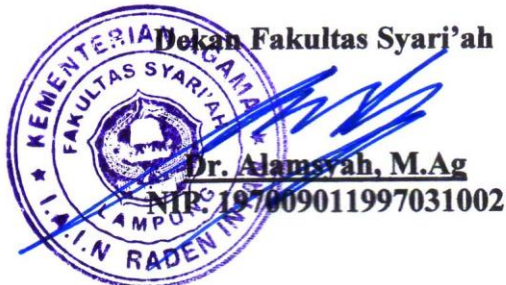
TIM MUNAQOSAH

Ketua : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag. M.Ag (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I. M.Ag. (.....)

Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. QS : An-nisa (4) : 35.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku, Syahmin S.Pd dan Ibu Aida S.Pd atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kakakku, Septi Aisyah dan adik ku Habibi MS dan Mudhammatan yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan keceriaan.
3. Kawan kawan seperjuangan Hamit, Agung, Harun, Ajiz, fauzan, kiki pandu Maksum dan lain sebagainya
4. Almamater Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Zuljalali walikrom. Dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1993 di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Putra kedua dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Syahmin S.Pd. dan Ibu Aida S.Pd.

Pendidikan dasar dimulai dari SD N 01 Bandar Dalam, pada tahun 2006. Melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP N 1 Baradatu Way Kanan, tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Prespektif Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Marwin S.H, M.H. dan Gandhi Liyorba Indra, S.Ag. M.Ag Selaku ketua jurusan dan sekertaris jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah.
3. Drs. H. Khoirul Abror, M.H. dan Marwin, S.H. M.H. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah.
5. Tim Penguji skripsi, Gandhi Liyorba Indra, S.Ag. M.Ag Ketua sidang, Arif Fikri, S.H.I. M.Ag. Seketaris, Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H. Penguji 1, : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. Penguji 2.
6. Kepala dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Segenap guruku di SD,SMP dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Drs. H. Bahrussan Yunus, S.H. M.H. ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang serta narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Hamit, Harun, Ajis, Fauzan Maksun dan seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas A dan B angkatan 2012 atas motivasi dan juga kebersamaan.
- 10.Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para Pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Januari 2017
Penulis

Zuljalali Walikrom
NPM.1221030017

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
M O T T O.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERSI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mediasi	15
1. Pengertian Mediasi.....	15
2. Dasar Hukum Mediasi.....	19
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	21
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi	22
B. Mediasi Menurut Perspektif Hukum Islam.....	24

1. Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam..	24
2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam.	25
3. Pengangkatan dan Syarat Mediator dalam Islam	27
C. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	28
1. Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Menyelesaikan sengketa di Pengadilan	28
2. Revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008.....	30
3. Jenis-jenis mediasi	34

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang	37
B. Visi dan Misi PA Kelas 1A Tanjungkarang	43
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang	43
D. Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Kelas 1A Tanjungkarang	46
E. Faktor-Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang	55

BAB IV ANALISIS

A. Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang	61
B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A	

Tanjungkarakang	68
-----------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Teransliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	Es (dengantitik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	ḥ	Ha (Dengan Titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Kadan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (Dengantitik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	ṣ ād	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍ ād	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ṭ ā'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓ ā'	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mīm	M	Em
ن	N	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini terlebih dahulu diperjelas istilah dan ungkapan yang dianggap perlu. Judul proposal ini adalah : Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang)

Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang.¹

Hukum Islam menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah :

حِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا
أَوْ وَضْعًا

Artinya: pembicaraan Syari' yang berubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berupa tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan.²

Perspektif hukum Islam maksudnya adalah menelaah, meneliti apa yang telah diputuskan dalam perkara dispensasi nikah melalui kajian hukum Islam.

Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *implementation* yang artinya pelaksanaan, sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya penerapan, pelaksanaan.³

¹Mas'ud Hasan, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm 21

²Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Daar Al-Qalam, Kuwait, 1984, hlm 74.

³Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 313.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan ini terbit pada bulan Februari 2016.

Mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁴

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang adalah Pengadilan tingkat pertama bagi orang yang bergama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul proposal ini adalah sebuah penelitian yang membahas masalah tinjauan Hukum Islam tentang tata cara penyelesaian sengketa antara dua orang yang berperkara melalui jalur perundingan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul ini sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi memunculkan harapan baru terutama efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, kekuatan PMA ini terletak pada wajib hadirnya dua orang yang bersengketa. Hal inilah yang menarik

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 16.

⁵Didi Kuswadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012, hlm 297.

untuk diteliti dalam penulisan skripsi tentang tata cara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang.

2. Penulisan penelitian ini lebih mengarah pada mediasi di Pengadilan Agama dan ini erat relevansinya dengan jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah sehingga penulis berkeyakinan penelitian ini dapat diselesaikan mengingat tersedianya literatur yang dibutuhkan.

C. Latar Belakang Masalah

Masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh UU Nomor 28 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku tanggal 29 Oktober 2009 dapat diwujudkan dengan baik. Menurut Susanti Adi Nugroho hal tersebut “memang merupakan suatu dilema, karena di satu sisi kuantitas banyaknya sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas”.⁶

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua (2) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.⁷

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak

⁶Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 182.

⁷*Ibid.*, hlm. 1.

yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.⁸

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁹

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*non litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.¹⁰

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2006, hlm. 151.

⁹Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁰Syahrizal Abbas *Op. Cit.*, hlm. 301.

Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.¹¹

Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003, pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi *pilot court*, yaitu PN Bengkulu, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi *pilot court* tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam.ⁱⁱ Selain empat pengadilan yang menjadi *pilot court*, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa

¹¹Modul I, *Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor, 2016, hlm 7.

Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.¹²

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan”.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses perkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.¹³

Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagai *pilot court*, yaitu PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku Komentar PERMA No. I Tahun 2008 dan buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2016 serta video tutorial pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui website Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁴

¹²*Ibid.*, hlm 8

¹³*Ibid.*, hlm 9

¹⁴*Ibid.*, hlm 10.

Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi. Pasal 6 ayat (1) "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum." Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut menadampingi prinsipal dalam pertemuan mediasi.¹⁵

Berbeda dengan Perma Mediasi sebelumnya yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang tidak kita dapati kewajiban bagi Para Pihak atau Prinsipal untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 "Hakim, Mediator, dan Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini." Jadi kewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 bukan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi.

Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi." Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 "Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi." Di pasal ini juga tidak terdapat redaksional yang tegas bagi para pihak untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, hanya berupa dorongan dari hakim, itu pun mendorongnya bisa hanya melalui perantara kuasa hukum untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi, jadi titik tekannya pada peran dan keaktifan bukan pada kehadiran pada pertemuan mediasi. Begitu pula bunyi Pasal 7 ayat (3) yang kurang lebih sama yang mewajibkan kuasa hukum untuk mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

¹⁵Doni Darmawan, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*, Muara Sabak, 2016

Pada Perma Mediasi diatur bahwa ketidakhadiran merupakan salah satu sebab yang dapat mengakibatkan pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi oleh mediator. Dalam hal penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi maka oleh hakim pemeriksa perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat (vide Pasal 22 Perma 1/2016).¹⁶

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dijadikan sebagai objek penelitian terkait dengan diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai revisi dari PERMA No. 2 Tahun 2003 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

¹⁶Modul I, *Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Op.Cit., hlm 11.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam proses mediasi

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun lembaga peradilan Agama yang secara khusus menangani masalah mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.¹⁷ disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan- satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola- pola yang berlaku.¹⁸ Objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang sehingga penelitiannya disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*),¹⁹ yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

¹⁷Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 69.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-21.

¹⁹Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. Ke-3, Agustus 2001, hlm.21.

2. Data dan Sumber

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas.²⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari hakim-hakim mediator, ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang serta para pihak yang melakukan mediasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016, serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen- dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literature lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Metode Pengumpul Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari kata empiris. Penelitian ini menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk empirik, penulisan menggunakan beberapa metode, yaitu:

²⁰Lois Gootschalk, *Understanding History, A. Primer of Historical Method*, Terjemah Nogroho Noto Susanto, UI Press, 1985, hlm 32.

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²¹

Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati keadaan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

b. Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan,²² dalam hal ini melakukan wawancara dengan para hakim dan ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejauh mana implementasi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

²¹Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 58.

²²*Ibid.*, hlm. 59.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data sebagai menurut Muhammad Nasir, sebagai berikut:

a. Penyuntingan (*editing*)

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan (2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan (3) Keajegan (*consistency*) jawaban responden.

b. Pengkodean (*coding*)

Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda (simbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean adalah untuk penyederhanaan jawaban responden. Harus diperhatikan pula pemberian pada jenis pertanyaan yang diajukan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup)

c. Tabulasi (*tabulating*)

Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, untuk kemudian disajikan dalam bentuk table. Tabel dapat berupa tabel frekuensi, tabel korelasi, atau tabel silang. Pada dasarnya ada 2 cara pelaksanaan tabulasi, yaitu: (1) Tabulasi manual. Semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian tabel dilakukan dengan tangan. (2) Tabulasi mekanis. Pelaksanaan dengan cara ini dibantu dengan peralatan tertentu, yaitu: komputer. Semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat yang telah dipilih.²³

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Metode yang digunakan komparatif, yaitu metode analisis yang diwujudkan melalui pengumpulan data yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul/ diteliti.

²³Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.3, 1988, hlm 76-78

Disamping itu, peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁴ Dengan demikian *case study* ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi kejadian, sehingga mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subyek yang diteliti.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 38.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa inggris, "*mediation*", atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.²⁵

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral" antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.²⁶

²⁵Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 56

²⁶Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari "ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 2-3

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara berdialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.²⁷

Definisi lainnya dikemukakan oleh Kovach, agar dapat ditarik beberapa ciri dari proses mediasi.

Mediasi adalah:

- a. Suatu istilah umum yang menggambarkan intervensi dari pihak ketiga dalam proses penyelesaian pertikaian.
- b. Suatu proses yang dilakukan pihak ketiga dengan cara memfasilitasi dan mengkoordinasi negosiasi (perundingan) dari pihak-pihak yang berselisih.
- c. Intervensi ke dalam proses perselisihan dan negosiasi oleh pihak ketiga yang netral dan imparsial yang dapat diterima, yang tak mempunyai kuasa membuat keputusan yang berwibawa. Individu ini membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai penyelesaian sendiri dari masalah yang dipertikaikan, yang berterima secara sukarela.
- d. Suatu forum dalam mana seorang mediator yang imparsial secara aktif membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi dan memperjelas masalah yang menjadi keprihatinan, dan membantu

²⁷*Ibid*, hlm. 5-6

dalam hal merancang penyelesaian dari masalah-masalah tersebut.²⁸

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.²⁹ Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa;

- a. Ciri mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan,

²⁸Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Centre, Semarang, Cet Ke-1, 2007, hlm. 83-84

²⁹Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 91.

mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternative yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

- b. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan antar pihak, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.³⁰

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai kerusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Melalui metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-

³⁰Syahrial Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- b. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-Pasal didalamnya.
- c. UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat 2 menyatakan: “Ketentuan ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- e. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.³¹

³¹Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 164-165

Sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.
- b. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
- c. Pasal 1858 KUH Perdata: “segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional.
- d. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 angka (10) dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bias dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.³²

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersangkutan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral dan *imparsial*. Penyelesaian sengketa dengan mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, ketika para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya.

³²PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1

Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan

yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³³

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelebagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

B. Mediasi menurut Perspektif Hukum Islam

1. Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata “*sulḥu*” yang berarti memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *sulḥu* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sebagai istilah, *sulḥu* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkar. Selain kata *sulḥu*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.³⁴

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.³⁵

³³Syahrial Abbas, *Op. Cit*, hlm. 24-26

³⁴Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004, hlm. 328.

³⁵Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid IV, Ichtiar Baru Van Hoove, Jakarta, 2004, hlm. 1750.

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga *Tahkim*.³⁶

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan *Al-Qada*. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai “daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.”³⁷

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. QS : An-nisa (4) : 35.³⁸

³⁶Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 12.

³⁷Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm. 15

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, CV. Media Fitrah Rabbani, Bandung, 2009, hlm. 84.

Pada ayat yang lalu telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi *nusyuz* di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqaq*) diantara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami boleh mengutus seorang *hakam* dan istri boleh pula mengutus seorang *hakam*, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. Kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua *hakam* itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua *hakam* itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang *hakam* itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.³⁹

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^ج وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^د
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ^ج وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang

³⁹Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, Cet. 1, hlm. 266-267.

sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Dalam hadiŖ disebutkan yakni:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ حَلَّ حَرَامًا (رواه الأئمة ذِ وَصَحَّحَهُ)⁴¹

Artinya: Dari Amar bin Auf Al Muzanni r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Turmudzi dan hadis ini disahihkan).

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

3. Pengangkatan dan Syarat Mediator dalam Islam

Mediator atau *Hakam* dalam Lembaga *Tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁴¹Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subulussalam*, Juz III, Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, hlm. 159.

siapa yang mengangkat dan mengutus *Hakam* atau Mediator dalam sengketa *Syiqaq*. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa' bahwa *Hakam* atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa *Hakam* dapat diangkat oleh suami Istri yang disetujui oleh mereka. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *Hakam* dalam kasus *Syiqaq* diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.⁴²

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/ 1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan, seorang *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *Hakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *Hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum *hudud* karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *Hakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qada* (orang yang berkopenten mengadili).⁴³

C. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Menyelesaikan sengketa di Pengadilan

Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No

⁴²Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm 187.

⁴³*Ibid.*, hlm 188.

1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglemen(HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.⁴⁴

Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003, pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi pilot court, yaitu PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi pilot court tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam. Selain empat pengadilan yang menjadi pilot court, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut

⁴⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 73.

sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya Pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.⁴⁵

Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagaipilot court, yaitu PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku Komentar PERMA No. I Tahun 2008 dan buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008 serta video tutorial pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui website Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Revisi Perma No. 1 Tahun 2008

a. Landasan Hukum

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Membuka akses terhadap keadilan (*acces to justice*) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

⁴⁵*Ibid.*, hlm 74.

Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

b. Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016

Dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- 3) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.⁴⁶

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari.

⁴⁶Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, 2017, hlm 21

Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- 1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- 2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- 3) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- 4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- 5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.⁴⁷

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik

- 1) Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
- 2) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
- 3) Mediator menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- 4) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
- 5) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, hlm 24

⁴⁸*Ibid*., hlm 32

Akibat hukum Tergugat yang tidak beritikad baik

- 1) Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
- 2) Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- 3) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
- 4) Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 5) Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.⁴⁹

c. Biaya Mediasi

Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma no 1 tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

- 1) Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.
- 2) Penggunaan Mediator hakim dan aparaturnya pengadilan tidak dipungut biaya jasa.
- 3) Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak
- 4) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.

⁴⁹*Ibid.*, hlm 32

- 5) Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 6) Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.⁵⁰

3. Jenis-Jenis Mediasi

a. Mediasi Wajib

Mediasi wajib ini adalah mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, masing-masing komponen yang terlibat mempunyai tugas dan fungsi untuk menyukseskan terlaksananya mediasi.

b. Mediasi Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Selama pemeriksaan perkara setelah mediasi wajib tidak berhasil, Para Pihak dapat mengajukan permohonan untuk berdamai. Atas permohonan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator. Jangka waktu mediasi adalah 14 hari terhitung sejak Penetapan Printah Mediasi.

c. Mediasi Sukarela Pada Tahap Upaya Hukum

Selama perkara belum diputus di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Para Pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Hasil kesepakatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali. Kesepakatan harus mengesampingkan Putusan yang telah ada sebelumnya. Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali memutus berdasarkan kesepakatan tersebut.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 37

d. Mediasi di Luar Pengadilan

Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syaria’ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjungkarang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.⁵¹

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan

⁵¹*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/ perselisihan masyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tiddak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)⁵²

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, Keluarlah *Besluit* P.T. Resident

⁵²Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah keresidenan Lampung, dalam Besluit tersebut dimuat tentang dasar hukum, darah hukum dan tugas serta wawenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 januari 1947 itu meliputi :

1. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
2. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka(waris) yang dilaksanakan secara islam.
3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
5. Mengurus soal-soal perbadatan.
6. Memberi fatwa dalam berbagai soal.⁵³

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman serta Kementrian dalam Negeri. Kementrian Agama C.q Biro peradilan Agama telah menyurati Mahakamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibals oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementrian Kehakiman RI

⁵³*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

(Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 april 1953 yang menyebutkan, “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah keresidenan lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Surat Kementrian Kehakiman itu ditunjukkan Kepada Kementrian dalam Negeri. Kemudian Kementrian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* keresidenan Lampung di Tanjungkarang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lmpung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syri’ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melaui surat tertanggal 27 Okober 1953 kemudian Kementrian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkmah Syari’ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman di Jakarta”.⁵⁴

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan suranya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementrian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut. K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.⁵⁵

⁵⁴*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

⁵⁵*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementrian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 mei 1954.
3. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.⁵⁶

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri

⁵⁶*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beraga Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁵⁷

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

⁵⁷*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

B. Visi dan Misi PA Kelas 1A Tanjungkarang

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.⁵⁸

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjungkarang untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.⁵⁹

C. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas 1A Tanjungkarang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekreteriatan Peradilan. Sehingga

⁵⁸*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

⁵⁹*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjunkarang Kelas IA sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Abu Thalib Zisma	Ketua Pengadilan
2	Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Asma Zainuri, S.H.	Hakim
4	Dra. Hj. Maimunah A.R, S.H, M.Hi.	Hakim
5	Drs. Syamsuddin, M.H.	Hakim
6	Drs. H. Abuseman Batoni, S.H.	Hakim
7	Dra. Hj. Maisunah, S.H.	Hakim
8	Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H, M.H.	Hakim
9	Djauhari, S.H.	Hakim
10	Drs. Firdaus. MA.	Hakim
11	Drs. H. Mumamad Nuh, S.H, M.H.	Hakim
12	Dra. Mulathifah, M.H.	Hakim
13	Drs. H. Hasan Faiz Bakry.	Hakim
14	Drs. Ahmad Nur, M.H.	Hakim
15	Drs. A. Nasrul, MD.	Hakim
16	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Hakim
17	Itna Fauza Qadriyah, S.H, M,H.	Panitera
18	H. Sulaiman Marzuki, S.H.	Wakil Panitera
19	Deska Fitrah, S.H, M.H.	Panitera Muda Permohonan
20	Dra. Husnidar.	Panitera Muda Gugatan
21	Syukur, S.Ag	Panitera Muda Hukum
22	Nelmi Rodiah Harahaf, S.H.	Panitera Pengganti
23	Mahmilawati, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
24	Dra. Hj. Maisarah.	Panitera Pengganti
25	Linda Hastuti, S.H, M,H.	Panitera Pengganti
26	Amnia Burmelia, S.H.	Panitera Pengganti
27	Hj. Elok Diantina, S.H.	Panitera Pengganti
28	Rosmiati, S.H.	Panitera Pengganti
29	Astri Kurniawati, S.H.	Panitera Pengganti
30	Eliyanti Suri, S.Ag, M.H.	Panitera Pengganti
31	Anika Rahmah, S. Ag.	Panitera Pengganti

32	Nursiah, S.Hi.	Panitera Pengganti
33	Vivi Wanty, S.H.	Panitera Pengganti
34	Rahmatiah Oktafiana, S.Hi.	Panitera Pengganti
35	M. Djulizar, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
36	Senioreta Mauliasari, S.H.	Panitera Pengganti
37	Dra. Nelfirdos, M.H.	Panitera Pengganti
38	Sudiman, S.H.	Sekretaris
39	Anis Khoirunnisa, S.Ag.	Kasub Per Tek. Info Pel
40	A.Fathurrohman, S.H, M.H.	Kasub Kepeg, Organi dan TA
41	Indria Yulisa, S.E.	Kasub Umum & Keuangan
42	M. Rosyidi.	Juru Sita
43	Ahmad Subroto, S.H, M.H.	Juru Sita
44	Himbauan, S.H, M.M.	Juru Sita
45	Ari Eka Putra, S.H.	Juru Sita
46	Haryati	Juru Sita
47	Ali Haidar, S.H.	Juru Sita
48	Mega Oktaria, A.Md	Juru Sita
49	Sri Widaryan, S.E, M.H.	Juru Sita Pengganti
50	Mulyati, S.H.	Juru Sita Pengganti
51	Dwi Astuti, S.Pdi.	Juru Sita Pengganti
52	Dra. Masturah.	Juru Sita Pengganti
53	Nurhayati, S. Hi.	Juru Sita Pengganti
54	Adriyadi, S.H.	Juru Sita Pengganti
55	Mulyati, S.H.	Arisiparis
56	Yasir, S.H.	Pranata Computer
57	Sri Widaryani, S.E, M.H.	Bendahara

Sumber : *Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang per Oktober 2016

Struktur organisasi yang dibentuk pada PA Kelas 1A Tanjungkarang bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.⁶⁰

D. Implementasi PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Kelas 1A Tanjungkarang

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa inggris, "mediation", atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2016, karena

⁶⁰*Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Setelah diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang mulai melaksanakan proses mediasi ini pada awal tahun 2016, karena dari pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang melakukan persiapan terlebih dahulu baik dari penunjukan mediator maupun tempat untuk melaksanakan mediasi sehingga awal tahun 2016 baru dapat diterapkan PERMA tersebut.⁶¹

Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dapat dikatakan belum efektif jika ditinjau dari hasil akhir mediasi, sebagaimana perkara-perkara lain yang bersifat kebendaan, karena perkara perceraian ini bersifat non kebendaan (perasaan) dan sudah tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak untuk bersatu kembali sehingga hal seperti ini sangat sulit untuk para pihak didamaikan melalui proses mediasi. Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Namun meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dapat langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.⁶²

⁶¹Syukur, S.Ag, Panitera Muda Hukum PA Kelas 1A Tanjungkarang, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2016

⁶²Syukur, S.Ag, Panitera Muda Hukum PA Kelas 1A Tanjungkarang, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2016

Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut baik sudah melalui proses BP4 maupun belum, para pihak dalam perkara tersebut wajib didamaikan oleh Mediator Hakim atau Non Hakim sesuai pilihan para pihak, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi atau perdamaian yang pada pokoknya tujuan perdamaian adalah kedua suami istri tidak jadi bercerai. Jika perdamaian terwujud, maka gugatan harus dicabut.

Masalah perdamaian yang menyangkut sengketa perceraian, terdapat 2 (dua) pendapat. Ada mediator hakim yang berpendapat bahwa yang dimaksud perdamaian dalam perkara perceraian adalah perdamaian untuk tidak jadi bercerai, dan hidup rukun kembali. Tetapi ada mediator hakim lain yang berpendapat bahwa kalau ternyata perdamaian dalam arti tidak cerai tidak mungkin terwujud, karena pada hakekatnya keduanya sudah tidak cocok lagi dan akan tetap mengakhiri ikatan perkawinan mereka, maka sebaiknya tetap dijatuhkan putusan cerai, sedangkan isi persetujuan perdamaian hanya mengatur mengenai pembagian barang gono-gini atau harta bersama, perwalian anak dan biaya nafkah. Pendapat mediator kelompok ini, adalah dalam rangka menyelamatkan harta bersama, agar selama proses perceraian belum tuntas, masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan atau menjual harta bersama kepada pihak ketiga.⁶³

Mediasi dalam perkara perceraian bukan sebagai makna mediasi yang sesungguhnya, karena mediasi yang sesungguhnya yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dengan berdamai. Jika mediasi dalam perkara perceraian dimaknai sebagaimana mediasi sebenarnya, maka dapat dikatakan sudah berhasil karena antara kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai. Sedangkan makna mediasi dalam perkara perceraian ini adalah bukan mencari jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak akan tetapi mereka harus kembali kepada posisi semula yaitu tidak bercerai.

Mediasi dalam perkara perceraian terkesan memaksa, karena mediator dengan sekuat tenaga harus mempersatukan

⁶³Syukur, S.Ag, Panitera Muda Hukum PA Kelas 1A Tanjungkarang, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2016

mereka yang ingin bercerai menjadi tidak jadi bercerai sehingga sangat sulit sekali tugas mediator menjadikan mereka kembali seperti semula karena hal ini menyangkut perasaan kedua belah pihak. Mereka sangat sulit dimediasi karena sama-sama sepakat untuk bercerai dan tidak bisa disatukan kembali seperti semula.⁶⁴

Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang tersebut yang tidak menangani perkaranya. Mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dilaksanakan di ruangan khusus mediasi yang berada disamping kanan ruang tunggu para pihak yang akan melakukan sidang. Pada proses mediasi ini sebisa mungkin para pihak sendiri hadir mengikuti proses mediasi, karena hal ini lebih memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan

⁶⁴Syukur, S.Ag, Panitera Muda Hukum PA Kelas 1A Tanjungkarang, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2016

berdamai dari pada para pihak diwakilkan oleh advokat/kuasa hukumnya.⁶⁵

Secara garis besar prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang mengikuti aturan-aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2016, adalah sebagai berikut: pada sidang pertama yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi serta memilih mediator dalam daftar mediator yang telah disediakan oleh ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang berisi 6 mediator yang semuanya hakim. Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.⁶⁶

Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim, jika para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi biasanya mediator yang dipilih itu bersilang dari ruang sidang A dan ruang sidang B. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, mediasi berlangsung 3 sampai 4 minggu, itu dikarenakan banyaknya

⁶⁵Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

⁶⁶Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dan minimnya mediator.⁶⁷

Apabila para pihak dalam waktu yang ditentukan belum mencapai kesepakatan, para pihak diberi perpanjangan waktu yang disepakati oleh para pihak. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Para pihak dengan sengaja tidak menghadiri sidang pertemuan mediasi dua kali berturut-turut disebabkan para pihak mengetahui bila hal itu terjadi menyebabkan gagalnya mediasi, dan tidak adanya sanksi bila tidak menghadiri pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati bersama.

Dalam berlangsungnya mediasi dengan waktu setengah jam yang dihadiri kedua belah pihak, mediator membuka sidang pertemuan mediasi dengan bacaan bismillah, setelah itu mediator menerangkan dengan singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibilitas pengalamannya, kenetralan dan tidak memihak kepada siapapun, tujuan proses ini untuk menyelesaikan masalah karena kedua belah pihak yang memintanya bukan menekan satu pihak, proses bahwa setiap pihak akan diberikan kesempatan yang sama baik secara tersendiri atau bersama, proses ini bersifat rahasia dan mengenai keputusan terakhir.

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka masing-masing kepada mediator, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam tahap ini para pihak bersikap sangat emosional dan saling menyalahkan dalam hal kasus perceraian sampai bisa diajukan ke pengadilan. Para pihak saling menuduh dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama serta bersikap egois yang

⁶⁷Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

menyebabkan banyaknya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.⁶⁸

Apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam pertemuan mediasi yang pertama mediator perlu mengadakan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dalam kaukus tersebut mediator berusaha berbicara lebih mendalam agar perkara para pihak dapat mencapai kesepakatan berdamai, tetapi para pihak memang sudah yakin bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Setelah diadakan kaukus dan para pihak dipertemukan lagi, mediator berusaha lagi mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, antara lain mediator berusaha mengingatkan kepada para pihak kenangan-kenangan sebelum para pihak berperkara (nostalgia), mengingatkan akan anak-anak para pihak karena korban dari perceraian itu adalah anak-anak dan memberikan pengertian akibat dari masalah mereka, misalnya disini perkara perceraian karena dominannya kasus perceraian yang di ajukan ke Pengadilan Agama dengan memberi penjelasan akibat dari perceraian banyak masalah yang akan timbul seperti, nantinya akan mempunyai bapak/ ibu/ anak tiri itu tidak enak, serta memotivasi untuk masa depan yang lebih cerah.

Setelah beberapa kali pertemuan mediasi, dan mediator serta para pihak telah merumuskan hasil akhir dari perundingan mediasi ini. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator mengajukan pencabutan perkara. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, hakim menanyakan kepada para pihak tentang kebenaran laporan mediator tersebut bahwa mediasi berhasil serta dari laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis

⁶⁸Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

hakim menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut dan membuat penetapan pencabutan perkara.

Para pihak pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua mediasi tetap pada pendirian mereka, dan sampai waktu yang ditentukan oleh pengadilan para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan dan itu menyebabkan gagalnya mediasi. Dan juga banyak pula setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua para pihak tidak mau hadir lagi sampai berakhirnya waktu untuk menempuh mediasi yang akhirnya mediasi dinyatakan gagal.

Apabila para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau tidak bisa berdamai dan bersikeras untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan (Litigasi), mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.⁶⁹

Perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang sepanjang tahun 2016 sebanyak 324 perkara. Untuk lebih jelasnya prosentase keberhasilan mediasi dalam tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Perkara Mediasi di PA Kelas 1A Tanjungkarang
Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	23
2	Februari	24
3	Maret	21
4	April	23
5	Mei	36
6	Juni	11

⁶⁹Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

7	Juli	32
8	Agustus	34
9	September	25
10	Oktober	33
11	Nopember	34
12	Desember	28
Jumlah		324

Sumber : *Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016

Tabel 2
Statistik Perkara Mediasi yang diputus di PA Kelas 1A
Tanjungkarang Tahun 2016

No	Bulan	Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
1	Januari	1	20	2
2	Februari	-	21	3
3	Maret	2	18	1
4	April	1	20	2
5	Mei	-	33	3
6	Juni	-	10	1
7	Juli	1	31	-
8	Agustus	-	32	2
9	September	-	23	2
10	Oktober	-	33	-
11	Nopember	1	27	6
12	Desember	-	25	3
Jumlah		6	293	25

Sumber : *Dokumentasi* PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dari 324 perkara mediasi yang masuk pada tahun 2016 berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara, tidak berhasil 293 perkara dan gagal (tidak melanjutkan mediasi) sebanyak 25 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pada perkara perceraian hasil mediasi kurang efektif dari 324 perkara yang masuk hanya berhasil dimediasi 6 perkara atau prosentase keberhasilan sebesar 1,85%, sedangkan yang tidak berhasil sebesar 90,43% dan gagal sebesar 7,72%. Proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian dikatakan belum efektif karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi hal ini tentu saja disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

E. Faktor-Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang telah menjalankan aturan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dengan sebaik- baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi serta agar tidak mengalami penumpukan perkara di Mahkamah Agung nantinya, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dari para pihak maupun dari mediator sendiri.⁷⁰

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang telah menjalankan aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dengan sebaikbaiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi serta agar tidak mengalami penumpukan perkara di Mahkamah Agung nantinya, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dari para pihak maupun dari mediator sendiri. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang wajib terlebih

⁷⁰Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi, yang dominannya adalah perkara perceraian dan yang berhasil mencapai kesepakatan berdamai yang disertai pencabutan perkara.

Mediasi tidak harus menghasilkan kesepakatan berdamai, bisa saja para pihak bersikeras membawa perkaranya berlanjut dalam proses pengadilan (litigasi). Karena mediator tidak berwenang untuk memutus perkara yang sedang terjadi di antara para pihak, mediator hanya mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Jadi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang belum bisa dikatakan berhasil, dan mengalami hambatan-hambatan dalam prosesnya, itu dikarenakan banyaknya kendala.

Setiap mediasi harus dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya agar mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai, tetapi dari pihak penggugat maupun tergugat sendiri susah sekali dipertemukan, para pihak enggan datang pada proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu dalam proses mediasi yang dihadiri para pihak, masing-masing pihak tetap bertahan pada perkaranya semula dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munculnya sifat gengsigengsian di antara para pihak juga menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

Dilihat dari kasus sengketa yang banyak di ajukan adalah dominant perkara perceraian, dimana masalah yang dihadapi memang sudah rumit dan perceraian adalah jalan yang terbaik menurut para pihak dan tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak adanya tawar menawar dalam proses mediasi yang bisa diselesaikan dengan cara damai, serta perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan yang luka dalam hati memang sulit untuk dimaafkan.

Pengadilan Agama sendiri masih baru dalam menjalankan proses mediasi sedangkan di Pengadilan Negeri sudah pernah menjalankan Perma No.2 tahun 2003 yang telah

direvisi menjadi Perma No. 1 tahun 2016 sekarang yang digunakan dalam Pengadilan Agama. Dalam Perma waktu yang diberikan untuk proses mediasi yaitu 40 hari, tetapi dalam pelaksanaannya hanya berlangsung 3-4 minggu serta waktu untuk proses mediasi kurang lebih setengah jam saja, itu dikarenakan banyaknya perkara yang masuk pada pengadilan.

Para pihak yang menguasai perkaranya kepada kuasa hukum atau advokat, biasanya kuasa hukum jarang memberitahukan akan pentingnya mediasi dan kuasa hukum lebih menyarankan agar perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan enggan menyelesaikan dengan cara damai/ mediasi, tetapi tidak semuanya advokat bersikap seperti itu.

Mediator juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediator yang berasal dari semua hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan mediasi mengalami sedikit kesulitan, itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam hal mediasi mungkin disebabkan para hakim belum mempunyai sertifikat mediator dan belum begitu mendalami tentang mediasi. Pada proses mediasi, mediator memfasilitasi proses agar dapat menggali kepentingan para pihak, sedangkan tugas hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan yang bersengketa serta minimnya jumlah mediator di Pengadilan Agama yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah perkara yang diajukan.

Adapun faktor-faktor yang memperhambat proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, antara lain:

1. Perceraian adalah jalan terbaik yang diambil oleh para pihak dalam masalah rumah tangga mereka yang menurut mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan yang luka dalam hati dan sangat sulit untuk dimaafkan dan tidak dapat untuk dipaksakan, karena proses mediasi dalam perkara perceraian ini mengembalikan perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah hilang agar kembali

seperti semula, sehingga perkara perceraian untuk dimediasi sangat susah.⁷¹

2. Pihak penggugat maupun tergugat susah sekali dipertemukan dalam proses mediasi, para pihak enggan datang sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, sedangkan dalam melaksanakan proses mediasi ini harus ada iktikad baik dari para pihak, jika tidak ada iktikad baik maka mediasi itu bias dikatakan gagal. Kehadiran kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi bukan karena mereka ingin menyelesaikan perkara perceraian mereka secara damai dengan mempunyai iktikad baik, akan tetapi karena mereka takut jika tidak mengikuti prosedur mediasi ini maka permohonan mereka akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA No.1 tahun 2016 yaitu (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik. Disamping itu jika para pihak hadir dalam proses mediasi, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya semula yaitu bercerai dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munculnya sifat gengsi-gengsian di antara para pihak juga menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.⁷²
3. Kendala teknis dan tempat untuk melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang belum memadai, sehingga ini sangat mempengaruhi proses mediasi.⁷³

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan

⁷¹Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

⁷²Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

⁷³Drs. Firdaus, MA, Hakim PA Kelas 1A Tanjungkarang, wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pertemuan siding mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator atas kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekali untuk dipertemukan guna tercapainya keberhasilan mediasi.

BAB IV

ANALISIS

A. Implementasi PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab III data lapangan dapat diketahui bahwa mediasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Prosedur mediasi telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang setelah belakunya PERMA No. 1 tahun 2016 yang telah berjalan satu tahun belakangan ini. Mediasi yang dilakukan pada tahun 2016 sebanyak 324 perkara, berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara (1,85%), tidak berhasil 293 perkara (90,43%) dan gagal (tidak melanjutkan mediasi) sebanyak 25 perkara (7,72%).

Secara garis besar prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang merujuk pada data di Bab III sesuai dengan aturan-aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.

2. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
3. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak.
4. Apabila para pihak dalam waktu yang ditentukan belum mencapai kesepakatan, para pihak diberi perpanjangan waktu yang disepakati oleh para pihak. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
5. Proses mediasi berjalan dalam waktu setengah jam yang dihadiri kedua belah pihak, mediator membuka sidang pertemuan mediasi dengan bacaan bismillah, setelah itu mediator menerangkan dengan singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibilitas pengalamannya
6. Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka masing-masing kepada mediator, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
7. Apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam pertemuan mediasi yang pertama mediator perlu mengadakan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Setelah diadakan kaukus dan para pihak dipertemukan lagi
8. Setelah beberapa kali pertemuan mediasi, dan mediator serta para pihak telah merumuskan hasil akhir dari perundingan mediasi ini. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator mengajukan pencabutan perkara.

9. Apabila para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau tidak bisa berdamai dan bersikeras untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan (litigasi), mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
10. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Asas tersebut sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan "*Islah*", karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS: Al-Hujurat (49): 9 dimana dikemukakan bahwa "Jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damailah mereka". Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar ibnu Khattab ketika menjabat khalifah ar Rasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlanjut sebaiknya dihindari.

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang perdamaian jika ada suatu persengketaan antar umat manusia, yaitu dalam QS: An-Nisa (4): 35 yang artinya: "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan, kita diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.

Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10, yang artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. QS: Al Hujurat (49): 9-10.

Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, bila didasarkan pada kesepakatan berdamai. Jika perkara diputus pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat

Penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kesepakatan mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Pada hakekatnya semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial/PHI, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, tidak perlu dimediasikan di pengadilan.

Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti akan ada pihak yang akan dimenangkan dan yang dikalahkan, tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Selama proses mediasi berlangsung banyak para pihak yang tidak mentaati peraturan mediasi, para pihak sering tidak hadir dalam siding pertemuan mediasi untuk melakukan proses mediasi. Para pihak enggan hadir dan bertemu dengan pihak lainnya, itu menyebabkan proses mediasi tidak berhasil. Apabila para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, yang telah dipanggil secara patut maka mediasi dinyatakan gagal. Para pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama dan para pihak sulit sekali untuk didamaikan karena sifat gengsi mereka sangat tinggi.

Waktu untuk mengetahui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai atau mediasi gagal bisa dilihat dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka segala pernyataan dan pengakuan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

proses persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dan proses litigasi sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pernyataan dan pengakuan yang sudah disampaikan dalam proses mediasi tidak boleh digunakan dalam proses litigasi. Segala catatan yang dibuat oleh mediator selama proses mediasi harus dimusnahkan.

Hal ini untuk menunjukkan sifat kerahasiaan dalam proses mediasi. Hanya kesepakatan yang dibuat secara tertulis merupakan hasil dari proses mediasi yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Seorang mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Sama seperti yang terjadi pada catatan mediator, maka untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi seorang mediator tidak dapat dijadikan saksi. Proses mediasi biasanya bersifat tertutup dan juga dengan adanya kemungkinan kaukus antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain. Ini juga menyebabkan mediator wajib menjaga rahasia baik yang diungkapkan oleh para pihak pada waktu kaukus maupun hal-hal yang terjadi selama berjalannya mediasi. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas is kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi.

Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian di antara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130 HIR hanya bersifat formalitas. Kalau begitu, kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa

hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan: “keadilan hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.”

Pengadilan Agama juga mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke Pengadilan Agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Namun meskipun para pihak langsung datang ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4, perkara tetap diperiksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan maka pihak penggugat mencabut perkaranya.

Mediasi merupakan salah satu model *Alternative Dispute Resolution* disamping negosiasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu perdamaian. Pihak ketiga yang disebut mediator dengan demikian berfungsi sebagai penengah. Mediator berposisi ditengah sebagai pihak yang netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Mediator berada persis di tengah-tengah konflik yang tengah berlangsung dan secara mendalam terlibat aktif untuk mencoba menemukan jalan keluar yang dirumuskan bersama-sama dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan sang mediator tidak lain adalah mencoba untuk membangun ataupun membangun kembali komunikasi yang baik dan cukup antara pihak yang sedang berkonflik, mencoba mendorong kedua pihak untuk berkomunikasi tanpa melibatkan emosi dan kemarahan, ketakutan dan ancaman.

Perlu diketahui pula bahwa mediasi akan sangat berguna terutama ketika aspek hukum mengenai apa yang menjadi sengketa tidak jelas, kedua pihak yang bersengketa menginginkan tetap terjadinya hubungan yang baik antara satu

sama lain, kedua belah pihak berkeinginan keras untuk mengakhiri persengketaan dan tentunya ada keinginan baik antara kedua belah pihak. Namun demikian mediasi juga sangat mungkin mengalami kesulitan terutama ketika kedua belah pihak tidak menghendaki.

Jadi, implementasi PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dapat dikatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hanya saja belum efektif dan efisien, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Faktor pendukung agar mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan berdamai lebih banyak yaitu antara lain: dari para pihak sendiri yang menaati dengan hadir dalam pertemuan mediasi sesuai jadwal yang ditentukan, para pihak yang mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian dimasa depan, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam serta tidak bersikap emosional melainkan bersikap pemaaf, para pihak mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.

Semua perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama wajib dimediasi terlebih dahulu, karena apabila mediasi tersebut dilaksanakan sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa maupun pihak Pengadilan Agama. Oleh karena itu hakim mediator harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan banyaknya keuntungan yang didapat dari hasil mediasi tersebut.

Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau

kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, antara lain:

1. Perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan perasaan, ini yang membuat perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi kepada para pihak yang bersangkutan, karena para pihak yang sudah membawa perkaranya ke pengadilan biasanya sudah yakin dengan keputusannya yang diambil yaitu untuk bercerai dengan pasangannya.
2. Ketidak hadirannya salah satu pihak juga menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan mediasi. Ketidak hadirannya tersebut karena mereka sudah sepakat untuk bercerai dan keinginan mereka sudah tidak bisa di ganggu gugat apalagi untuk didamaikan. Adapun kehadiran para pihak hanya untuk menaati peraturan yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang mewajibkan mediasi, bukan karena ada iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi tersebut, sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses mediasi.
3. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting, yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, di samping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan di mana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka, sehingga tidak diketahui oleh umum. Hal ini karena ruang untuk

pelaksanaan mediasi berada di ruang hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

Perkara yang berhasil dimediasikan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebendaan, misalnya harta waris, harta gono gini, hak hadhonah dan lain sebagainya. Sedangkan perkara perceraian yang menyangkut perasaan (non kebendaan) sangat sulit dimediasikan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

- a. Implementasi PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perma tersebut, Mediasi yang dilakukan pada tahun 2016 dari 324 perkara mediasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara, tidak berhasil 293 perkara dan gagal (tidak melanjutkan mediasi) sebanyak 25 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pada perkara perceraian hasil mediasi kurang efektif dari 324 perkara yang masuk hanya berhasil dimediasi 6 perkara atau prosentase keberhasilan sebesar 1,85%, sedangkan yang tidak berhasil sebesar 90,43% dan gagal sebesar 7,72%. Prosedur mediasi ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*Islah*”, karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS: Al-Hujurat (49): 9.
- b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang adalah: faktor dari para pihak sendiri yang menaati dengan hadir dalam pertemuan mediasi sesuai jadwal yang ditentukan, para pihak yang mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian dimasa depan, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam serta tidak bersikap emosional melainkan bersikap pemaaf, para pihak mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Adapun penghambatnya adalah: perkara

yang disengketakan sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai rasional sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, ketidak hadirannya salah satu pihak. Kehadiran mereka hanya untuk menaati peraturan yang ada yang mewajibkan mediasi, bukan karena ada iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi tersebut, sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses mediasi.

D. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran, diantaranya:

- a. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang agar lebih ditinjau ulang supaya lebih efektif lagi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka, hakim mediator juga harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan keuntungan yang akan didapat dari hasil mediasi tersebut, agar para pihak mau mengikuti prosedur mediasi dengan adanya iktikad baik bukan sebagai formalitas semata.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi lebih diperhatikan lagi oleh pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan cara menjelaskan/memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA, sehingga pelaksanaan mediasi pun bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang terjadi.
- c. Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang seharusnya berupaya untuk menyediakan ruangan khusus mediasi agar para pihak yang berperkara merasa nyaman dan terjaga privasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004
- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 56
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Didi Kuswadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012
- Doni Darmawan, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*, Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, diakses dari : <http://www:/PA-Muarasabak.go.id>, tanggal 8 Agustus 2016
- Gootschalk, Lois, *Understanding History, A. Primer of Historical Method*, Terjemah Nograho Noto Susanto, UI Press, 1985
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Halim Hasan, Abdul, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, Cet. 1
- Ash Shiddieqy Hasbi, Teungku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2007
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

- Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulussalam*, Juz III, Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2006
- Modul I, *Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Balitbang Kumdil Mahakamah Agung RI, Bogor, 2016
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Centre, Semarang, Cet Ke-1, 2007
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.3, 1988
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. Ke-3, Agustus 2001
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensklopedia Hukum Islam* Jilid IV, Ichtiar Baru Van Hoove, Jakarta, 2004

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung
Karang)**

Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan
Bagaimanakah tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ?	<p>1. Tahap Pra Mediasi</p> <p>2. Tahap Pelaksanaan Mediasi</p>	<p>1. Apa saja langkah dan persiapan yang dilakukan pada tahap pra mediasi ?</p> <p>2. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam tahap pra mediasi ?</p> <p>3. Apa yang dilakukan pihak pengadilan untuk membangun: kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, dan mengoordinasikan pihak yang bertikai ?</p> <p>4. Apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan mediator ?</p> <p>5. Siapa yang bertugas dalam pengumpulan</p>

		<p>fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi ?</p> <p>6. Jika mediator melakukan kaukus apa prosedur dan cara yang ditempuh ?</p> <p>7. Dalam tahap pelaksanaan mediasi ini apa saja yang dilakukan para pihak yang bermediasi dalam hal: persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati dan menciptakan opsi-opsi kesepakatan ?</p> <p>8. Dalam hal mediasi sistem apa yang diterapkan dan apa yang menjadi pertimbangan ?</p> <p>9. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar mediasi dinyatakan memenuhi kesepakatan secara</p>
	3. Tahap hasil mediasi	

		<p>hukum ?</p> <p>10. Apa saja langkah yang dilakukan para pihak dalam menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis ?</p> <p>11. Apakah dalam pelaksanaan hasil mediasi dalam (contoh kasus pertikaian dalam rumah tangga) melibatkan pihak lain di luar para pihak yang bermediasi ?</p> <p>12. Apakah kesepakatan mediasi disertai dengan akta kesepakatan perdamaian ?</p> <p>13. Apa langkah yang dilakukan mediator ketika mediasi gagal dilakukan ?</p>
<p>Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung</p>	<p>1. Faktor Pendukung</p> <p>2. Faktor Penghambat</p>	<p>1. Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di</p>

<p>Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ?</p>		<p>Pengadilan Agama Tanjung Karang ?</p> <p>2. Apa yang menjadi penghambat pelaksanaan Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang ?</p> <p>3. Apa solusi yang diambil pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses mediasi ?</p>
-------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------